

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN AKIBAT TRADISI ADAT KAWIN
TANGKAP**

TESIS



Oleh:

NOVITA IRENE WONG

202220252006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN AKIBAT TRADISI
ADAT KAWIN TANGKAP

Nama Mahasiswa : NOVITA IRENE WONG

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, Februari 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H. M.Kn

NIDN 0313046804

Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

NIDN 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN AKIBAT TRADISI
ADAT KAWIN TANGKAP

Nama Mahasiswa : NOVITA IRENE WONG

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Tesis : 8 Februari 2025

Jakarta, Februari 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H. M.Kn
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Novita Irene Wong

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252006

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 20 November 1976

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap” adalah benar-benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Novita Irene Wong
NPM 202220252006

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Novita Irene Wong

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252006

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 20 November 1976

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Novita Irene Wong
NPM 202220252006

ABSTRAK

Novita Irene Wong, 202220252006, 2025

Praktik kawin tangkap di Indonesia, khususnya di daerah Sumba, merupakan fenomena yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terhadap perempuan. Meskipun diakui sebagai bagian dari tradisi budaya, kawin tangkap sering kali melibatkan unsur pemaksaan, kekerasan, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu, yang bertentangan dengan prinsip kesukarelaan dalam perkawinan. Kesadaran akan dampak negatif dari praktik ini semakin meningkat, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat dan kolaborasi dengan tokoh adat. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti norma-norma sosial yang konservatif dan stigma terhadap korban, yang menghalangi mereka untuk melaporkan kasusnya.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus serta studi literatur yang ada guna menjawab dua permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum dan upaya hukum bagi korban kekerasan akibat tradisi kawin tangkap di Sumba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan akibat tradisi kawin tangkap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), khususnya dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa praktik budaya tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau pemaksaan dalam perkawinan. Hak-hak korban juga dijamin dalam BAB V Undang-Undang TPKS. Namun, penerapan perlindungan ini di lapangan masih jauh dari ideal karena terhambat oleh norma adat yang konservatif, stigma sosial terhadap korban, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat guna memastikan bahwa perlindungan hukum bagi korban benar-benar terlaksana secara efektif dan konsisten. Dan upaya hukum terhadap korban kawin tangkap di Sumba harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah keberlanjutan praktik ini. Pertama, korban harus didorong untuk melaporkan dengan jaminan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai. Kedua, aparat penegak hukum wajib menangani setiap kasus secara transparan dan akuntabel agar pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Ketiga, revisi Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan untuk menegaskan larangan terhadap perkawinan yang melibatkan pemaksaan serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Keempat, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan korban dan penghapusan praktik kawin tangkap. Dengan langkah-langkah ini, keadilan bagi korban dapat terwujud, dan praktik kawin tangkap dapat dihapuskan secara permanen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tradisi Kawin Tangkap, Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Berbasis Gender

ABSTRACT

Novita Irene Wong, 202220252006, 2025

The practice of capture marriage in Indonesia, especially in the Sumba region, is a phenomenon that reflects serious human rights violations, especially against women. Although recognized as part of a cultural tradition, capture marriage often involves elements of coercion, violence, and violations of individual rights, which are contrary to the principle of voluntariness in marriage. Awareness of the negative impacts of this practice is increasing, and various efforts have been made to address the problem, including stricter law enforcement and collaboration with traditional leaders. However, major challenges remain, such as conservative social norms and stigma against victims, which prevent them from reporting their cases.

By using normative legal research with a statutory regulatory approach and case studies as well as existing literature studies to answer two research problems, namely legal protection and legal remedies for victims of violence due to the capture marriage tradition in Sumba.

The results of the study show that legal protection for victims of violence due to the capture marriage tradition has basically been regulated in the Law on the Crime of Sexual Violence (Law on TPKS), especially in Article 4 which emphasizes that cultural practices cannot be used as an excuse to justify acts of violence or coercion in marriage. The rights of victims are also guaranteed in Chapter V of the TPKS Law. However, the implementation of this protection in the field is still far from ideal because it is hampered by conservative customary norms, social stigma against victims, and low legal awareness in society. To overcome this, synergistic efforts are needed between the government, law enforcement officers, and indigenous communities to ensure that legal protection for victims is truly implemented effectively and consistently. And legal efforts against victims of capture marriage in Sumba must be carried out comprehensively to ensure justice for victims and prevent the continuation of this practice. First, victims must be encouraged to report with guarantees of adequate legal protection and assistance. Second, law enforcement officers are required to handle each case transparently and accountably so that perpetrators receive appropriate legal sanctions. Third, a revision of the Marriage Law needs to be carried out to emphasize the prohibition of marriages involving coercion and to provide stricter sanctions for perpetrators. Fourth, the government, law enforcement officers, civil society organizations, and indigenous leaders must collaborate in creating an environment that supports the protection of victims and the elimination of the practice of capture marriage. With these steps, justice for victims can be achieved, and the practice of capture marriage can be permanently eliminated..

Keywords: *Legal Protection, Capture Marriage Tradition, Forced Marriage, Gender-Based Violence*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap.”**

Penyusunan karya ilmiah Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga Dosen pembimbing Teknis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya dalam penelitian ini sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
7. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Sesprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Materi Tesis, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya dalam penelitian ini sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
9. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Suami dan Anak tercinta yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama.

Dalam penyusunan karya ilmiah Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru di masa depan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.5. Kerangka Teori	12
1.6. Kerangka Konseptual	18
1.7. Kerangka Pemikiran	20
1.8. Penelitian Terdahulu	21
1.9. Metode Penelitian	24

BAB II KONSEP PERKAWINAN PADA TRADISI KAWIN TANGKAP	
2.1. Konsep Perkawinan	26
2.1.1. Pengertian Perkawinan	26
2.1.2. Tujuan Perkawinan	29

2.2. Konsep Perkawinan Adat	30
2.2.1. Pengertian Perkawinan Adat	30
2.2.2. Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan Adat	33
2.2.3. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat	39
2.3. Konsep Tradisi	43
2.4. Konsep Kekerasan	46
2.4.1. Pengertian Kekerasan	47
2.4.2. Ruang Lingkup Kekerasan	51

BAB III OBJEK PENELITIAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN AKIBAT TRADISI KAWIN TANGKAP

3.1. Pengertian Kawin Tangkap (Piti Rambang)	58
3.2. Sejarah Kawin Tangkap (Piti Rambang)	62
3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Tangkap di Sumba	68
3.4. Kasus-Kasus Kawin Tangkap di Sumba	76

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN KAWIN TANGKAP DAN UPAYA HUKUM

4.1. Praktik Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Positif	84
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap di Sumba	97
4.3. Upaya Hukum Terhadap Korban Kekerasan Akibat Tradisi Adat Kawin Tangkap di Sumba	113

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan	123
---------------------	-----

5.2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

